

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

A. Studi kepustakaan

Dalam memperjelas arah dan tujuan penelitian ini, maka kiranya perlu diberikan beberapa konsep teori dan ketentuan-ketentuan serta aturan-aturan yang dapat memberikan solusi yang erat kaitanya dengan masalah penelitian yang telah dirumuskan, agar dapat memberi pemecahan penelitian yang jelas dalam mengetahui dan membahasnya, terutama dalam menganalisa data, diantaranya :

1. Konsep administrasi

Ilmu administrasi selalu dikaitkan dengan kegiatan kerjasama, maka jelas bahwa setiap orang terlibat atau melakukan kegiatan kerjasama dengan orang lain maka orang yang berhubungan dengan administrasi dan akan mengalami beberapa masalah administrasi dalam pengertian administrasi bahwa bekerjasama yang dilaksanakan dalam suatu organisasi dalam usahanya untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi. secara etimologis, administrasi berasal dari bahasa latin *addan ministrare*, yang berarti “membantu, melayani, atau memenuhi “, serta *administratio* yang berarti “ pemberi bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pimpinan, pemerintahan, dan pengelolaan “.

Administrasi dalam arti sempit

Sedangkan administrasi dipandang dalam arti sempit dapat dicermati dari definisi berikut:

Administrasi adalah rangkaian pekerjaan ketatausahaan atau kesekretariatan yang terkait dengan surat-menyurat (koresponden) dan pengelolaan keterangan tertulis

lainnya. jadi administrasi adalah serangkaian kegiatan ketatausahaan atau kesekretariatan berupa surat-menyurat dan pengelolaan data atau keterangan tertulis lainnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang didasarkan oleh rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Zulkifli, 2005; 16).

Alternatif pendekatan yang harus diimplementasikan oleh seseorang administrator untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya pendekatan yang ditawarkan dalam konteks ini adalah dengan berpegangan pada prinsip yang diyakini benar. sebagaimana dimaksud bahwa prinsip yang diyakini benar. Manakala dijadikan pegangan dan acuan yang sangat mendukung terhadap upaya pencapaian suatu hasil yang diharapkan.

Sebagaimana dikemukakan Siagian (2003; 2) administrasi didefinisikan sebagai kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Sedangkan menurut Syafri (2012; 11) administrasi ialah rangkaian kegiatan (proses) usaha kerja samasekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien. karena kerjasama tersebut harus punya wadahnya yaitu organisasi.

Leonard D, White, administrasi ialah poses yang selalu terdapat pada setiap usaha kelompok, public atau privat, sipil, atau militer, sekala besar atau kecil (dalam syafri, 2012; 9).

Dwight waldo, administrasi sebagai usaha kerjasama yang rasional. yaitu tindakan yang dapat di perhitungkan dengan cermat untuk merealisasikan tujuan tertentu yang dikehendaki dengan kerugian/pengorbanan yang minimal untuk mewujudkan tujuan lain yang dikehendaki (dalam syafri, 2010; 10).

Brooks adam, administrasi adalah kemampuan mengkoordinasikan berbagai kekuatan sosial yang sering kali bertentangan satu dengan yang lain didalam satu organisasi sedemikian padunya sehingga kekuatan–kekuatan tersebut dapat bergerak sebagai satu kesatuan (dalam syafri, 2012;8)

2. Konsep organisasi

Organisasi berasal dari bahasa inggris, “organization” yang berakar dari bahasa latin organiz (are) yang berarti “ membangun “ suatu kebulatan dari bagian - bagian yang berkaitan satu dengan yang lain, organisasi merupakan sistem peran aliran aktiviitas dan proses pada hubungan kerja yang melibatkan beberapa orang sebagai pelaksanan tugas yang didesain untuk mencapai tujuan bersama.

Sebagaimana dikemukakan siagian (2003;6) organisasi merupakan setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat, seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang /sekelompok orang yang disebut bawahan

Sebagiaalat administrasi dan manajemen, organisasi dapat ditinjau dari dua sudut pandang.pertama organisasi dapat dipandang sebagai proses seperti dikemukakan siagian (2003;96) organisasi adalah tempat dimana kegiatan– kegiatan administrasi dan manajemen dijalankan, sedangkan organisasi sebagai proses adalah proses menyoroti interaksi antara orang–orang didalam organisasi itu.

Sebagaimana dikemukakan Kaho, josef riwu 2010: 293 pengorganisasian merupakan suatu proses yang mencakup:

- a. Definisi dan distribusi tanggung jawab dan tugas-tugas para pimpinan dan penyediaan personalia;
- b. Pencatatan hubungan formal yang ada antara kepentingan individu, pola tanggung jawaban dan jalur kontak secara teori;
- c. Memformulasikan prosedur standar metode kerja sama yang dipilih, dan intruksi-intruksi pelaksanaan sesuai dengan standar teknik

Menurut sufian (2003:13), pengertian organisasi dilihat dari sudut dinamikanya, aktifitas atau tindakan dari pada tata hubungan yang terjadi dalam organisasi itu, baik yang bersifat formal maupun informal.

Beberapa pendapat yang dikutip oleh sufian (2003:13-14) dari beberapa ahli mengenai batasan organisasi dapat dilihat sebagai berikut:

1. Dwight waldo, organisasi adalah struktur antara hubungan pribadi yang berdasarkan atas wewenang, formal dan kebiasaan-kebiasaan dalam situasi administrasi.
2. Jhon M. Gaus, organisasi adalah tata hubungan antara orang-orang untuk dapat memungkinkan terciptanya tujuan bersama dengan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab.
3. Leonard D. White, organisasi adalah pola hubungan yang ditetapkan secara formal oleh hukum dan top manajemen. Organisasi adalah sejumlah orang dalam jangka waktu yang panjang.
4. Herbet A. Simon, organisasi adalah pola komunikasi yang kompleks dan hubungan lain didalam suatu kelompok manusia.

Sufian (2003:43) menguraikan definisi organisasi dari dua segi, yaitu :

1. Organisasi sebagai wadah dimana kegiatan-kegiatan adiministrasi dijalankan.
2. Organisasi sebagai rangkaian hirarki antara orang-orang dalam suatu ikatan informal.

Sufian (2003:43) menyatakan bahwa organisasi-organisasi formal dicirikan dengan penyusunan berbagai kegiatan yang jelas, hubungan permanen, dan kekuasaan organisasi dan rencana terdahulu.

Desa merupakan suatu organisasi formal, menurut hicks organisasi formal mempunyai struktur yang dinyatakan dengan baik yang dapat menggambarkan hubungan-hubungan wewenang, kekuasaan, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Struktur juga menunjukkan saluran-saluran melalui aliran hubungan, organisasi formal mempunyai perincian pekerjaan yang jelas bagi tiap-

tiap anggota. Jenjang tujuan organisasi formal dinyatakan dengan tegas. Status, gaji, pangkat dan lain-lain diatur dan dikontrol secara baik, keanggotaan dalam organisasi formal diperoleh dengan sadar, pada waktu tertentu, dan biasanya terbuka, beberapa contoh organisasi formal adalah perusahaan besar, pemerintah pusat dan daerah, universitas-universitas (dalam Sutarto, 1984; 11-12)

Sufian (2003; 43) menyatakan bahwa organisasi-organisasi formal dicirikan dengan penyusunan berbagai kegiatan yang jelas, hubungan permanent, dan kekuasaan organisasi dari rencana terdahulu.

Berdasar luas wilayahnya, desa merupakan suatu organisasi daerah, menurut Kuhn organisasi daerah luasnya meliputi suatu daerah tertentu sesuai dengan pembagian wilayah yang berlaku dalam suatu Negara. Misalnya Desa, Kecamatan, Kotamadya, Provinsi.

3. Konsep manajemen

Manajemen sangat penting bagi setiap aktivitas individu atau kelompok dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan, manajemen berorientasi pada proses yang berarti bahwa manajemen membutuhkan sumber daya manusia, pengetahuan, dan keterampilan agar aktivitas lebih efektif atau dapat menghasilkan tindakan dalam mencapai tujuan dalam melaksanakan kesuksesan. Manajemen dalam organisasi sangat penting, karena tanpa manajemen tidak akan ada tujuan organisasi yang akan dicapai.

Manajemen adalah ilmu dan seni untuk melakukan tindakan guna mencapai tujuan. Manajemen sebagai suatu ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang disistematisasikan atau kesatuan pengetahuan yang terorganisasi. Sedangkan manajemen sebagai suatu seni yaitu merupakan keahlian, kemahiran, kemampuan serta keterampilan dalam menerapkan prinsip, metode, dan teknik dalam sumber daya manusia, dan sumber

daya alam (*human and natural resources*) secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan (siswanto,2005;9)

Menurut Uman (2012;1) manajemen adalah kegiatan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan menggunakan orang – orang lain.

Menurut EijiOgawa Manajemen adalah Perencanaan, Pengimplementasian dan Pengendalian kegiatan-kegiatan termasuk system pembuatan barang yang dilakukan oleh organisasi usaha dengan terlebih dahulu telah menetapkan sasaran-sasaran untuk kerja yang dapat disempurnakan sesuai dengan kondisi lingkungan yang berubah.

Menurut G.R. Terry :Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata.

Menurut Ricky W. Griffin :Manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (*goals*) secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal.

Menurut federick winslow taylor Manajemen adalah Suatu percobaan yang sungguh-sungguh untuk menghadapi setiap persoalan yang timbul dalam pimpinan perusahaan (dan organisasi lain)atau setiap system kerjasama manusia dengan sikap dan jiwa seorang sarjana dan dengan menggunakan alat-alat perumusan.

4. Konsep Pembangunan

Pembangunan sendiri dapat diartikan sebagai upaya untuk menciptakan dan memberikan alternative untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan cara manusiawi.

Dalam proses pembangunan dibutuhkan perencanaan yang matang dan memiliki alternative yang memungkinkan untuk diaplikasikan dan menjadi aspirasi. Pembangunan menitikberatkan kepada keragaman kehidupan dengan berlandaskan hukum dan menjadi solusi untuk permasalahan yang ada. Pengertian pembangunan disini diartikan sebagai suatu proses pembangunan sebagai proses menggambarkan adanya pengembangan, baik meliputi proses pertumbuhan (*growth*) maupun perubahan (*change*) dalam kehidupan bersama (organisasi) sosial dan budaya. Hal ini merupakan gambaran umum dari masyarakat luas (*society*).

Konsep pembangunan merupakan konsep yang sangat multidimensional, yang mengacu kepada serangkaian karakteristik dan segenap aspek kehidupan, baik aspek politik, ekonomimaupun sosial.

Secara umum pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Riyadi Dan Deddy Supriyadi Bratakusumah,2005)

Pemikiran tentang pembangunan pada awalnya diartikan sama dengan modernisasi dan industrialisasi, bahkan pembangunan dengan westernasi. Pemikiran tersebut didasarkan pada aspek perubahan,perkembangan, dan modernisasi serta industrilisasi secara keseluruhan mengandung unsur perubahan. Namun keempat hal tersebut mempunyai perbedaan yang cukup prinsip, karena masing-masing mempunyai latar belakang, asas dan hakikat yang berbeda meskipun semuanya merupakan bentuk yang merefleksikan perubahan (Riyadi Dan Deddy Supriyadi Bratakusumah,2005).

Tikson (2005) menyebutkan bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan.

Para ahli di atas berpendapat bahwa, pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi secara alami sebagai dampak dari adanya pembangunan (Riyadi Dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005)

Menurut Kunarjo (2002) pembangunan sektoral diartikan sebagai kumpulan dari kegiatan-kegiatan atau program yang mempunyai persamaan atau ciri serta tujuannya.

Menurut Raharjo Adisasmita, pembangunan merupakan suatu proses yang berdimensi jamak (multidimensional), mencakup perubahan orientasi dan organisasi dari sistem sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Pembangunan masyarakat desa diartikan sebagai aktiitas yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga mereka mampu mengidentifikasi kebutuhan dan masalah secara bersama.(dalam buku Adon,2015:219)

Menurut Todaro (2000;18) mnyatakan bahwa pembangunan bukan hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia.

Selanjutnya Todaro (2000;20) mendefinisikan pembangunan merupakan suatu proses muldimensial yang meliputi perubahan-perubahan struktural sosial,sikap masyarakat, lembaga-lembaga nasional, sekaligus peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan.

Menurut grant dalam suryono (2001;31) tujuan pembangunan ada dua tahap. Pertama, pada hakikatnya pembangunan bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan.Apa bila tujuan ini sudah mulai dirasakan hasilnya, maka tahap kedua adalah menciptakan kesempatan-kesempatan bagi warganya untuk dapat hidup bahagia dan terpenuhi segala kebutuhannya.

Pembangunan menurut Rogers sendiri dalam Agus Suryono (2001;132), pembangunan adalah suatu proses perubahan sosial dengan partisipatori yang luas dalam suatu masyarakat yang dimaksudkan untuk kemajuan sosial dan material (termasuk bertambah besarnya keadilan, kebebasan dan kualitas lainnya yang dihargai) untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka.

Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan (*progress*), pertumbuhan dan diversifikasi.Secara sederhana pembangunan sering diartikan sebagai suatu upaya untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik.Karena perubahan yang

dimaksud adalah menuju arah peningkatan dari keadaan semula, tidak jarang pula ada yang mengasumsikan bahwa pembangunan adalah juga pertumbuhan. Seiring dengan perkembangannya hingga saat ini belum ditemukan adanya suatu kesepakatan yang dapat menolak asumsi tersebut. Akan tetapi untuk dapat membedakan keduanya tanpa harus memisahkan secara tegas batasannya.

Pembangunan desa adalah suatu proses kebutuhan yang dirasakan didalam masyarakat terutama dalam situasi sosial yang dihadapi di dalam Negara-negara yang menghadapi perubahan sosial yang cepat. Pendekatan pembangunan masyarakat desa dipilih sebagai salah satu pendekatan dalam pembangunan nasional antara lain karena melalui pembangunan Desa tersebut tercermin penerapan nilai-nilai demokrasi, dimana secara teoritis tercermin keterpaduan antara perencanaan dari atas ke bawah (perencanaan dari pusat yang mencerminkan nilai-nilai nasional) dan perencanaan dari bawah ke atas yaitu melalui lembaga musyawarah desa ataupun usulan-usulan dari kelurahan sebagai hasil musyawarah yang didasarkan atas evaluasi hasil pembangunan sebelumnya ataupun kebutuhan yang ada, dan dapat pula karena adanya permasalahan baru yang mereka hadapi.

Menurut Riady dan Supriady (2005;3-22), terdapat langkah-langkah di dalam mengajak peran serta masyarakat secara penuh di dalam pembangunan dapat dilakukan dengan cara:

1. Merumuskan dan menampung keinginan masyarakat yang akan diwujudkan melalui upaya pembangunan.
2. Dengan dibantu oleh pendamping atau narasumber atau lembaga perhimpunan masyarakat dibuatkan alternative perumusan dari berbagai keinginan tersebut.
3. Merancang pertemuan seluruh masyarakat yang berminat dan berkepentingan, yang membicarakan cost dan benefit dipelaksanaan pembangunan ini.
4. Memilih tokoh masyarakat atau perwakilan masyarakat turut serta dalam proses selanjutnya.

5. Proses perencanaan program pembangunan dan pembiayaan pembangunan serta rencana pelaksanaan pembangunan dilangsungkan beberapa kali dan melibatkan seluruh instansi maupun pemeran pembangunan yang terkait, disamping tokoh atau wakil masyarakat dan DPRD.
6. Mendapatkan sejumlah usulan program pembangunan yang sudah disepakati.
7. Melaksanakan program pembangunan, disertai dengan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan.

Menurut Marbun (2002;113) bahwa pembangunan desa adalah seluruh kegiatan yang berlangsung di pedesaan dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong-royong masyarakat. Pembangunan desa diarahkan untuk memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya alam, dan mengembangkan sumber daya manusianya

Dari pengertian ini jelas bahwa pembangunan harus terus dikembangkan dengan dukungan sumber-sumber daya yang tersedia, dan dari pendapat-pendapat di atas jelas bahwa masyarakat bertindak sebagai subjek dari suatu pembangunan dan dapat dipastikan bahwa partisipasi masyarakat memiliki peranan penting bagi suksesnya sebuah pembangunan, baik pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintahan pusat maupun lingkup daerah. Dari pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan adalah suatu usaha atau proses yang dilakukan baik dalam bentuk pembangunan fisik maupun pembangunan nonfisik, dalam mengadakan perubahan-perubahan atau perkembangan menuju ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Pelaksanaan pembangunan harus dapat memberikan perubahan hidup bagi masyarakat menuju suatu kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Menurut Raharjo Adisasmita, mengartikan pembangunan masyarakat sebagai kondisi bagi kemajuan yang terencana untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi kemajuan sosial ekonomi masyarakat, dengan meningkatkan partisipasi masyarakat. Pakar lain memberikan batasan bahwa pembangunan masyarakat adalah perpaduan antara

pembangunan sosial ekonomi dan pengorganisasian masyarakat. (dalam buku Adon,2015:219)

Menurut Soelaiman M. Munandar, pembangunan masyarakat haruslah menerapkan prinsip-prinsip:

- a. Transparansi (keterbukaan);
- b. Partisipasi;
- c. Dapat dinikmati masyarakat
- d. Dapat dipertanggung jawabkan (akuntabilitas);
- e. Berkelanjutan(sustainable).

Pembangunan masyarakat dilakukan dengan pendekatan multisektor (holistik), partisipatif, berdasarkan pada semangat kemandirian, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta melaksanakan pemanfaatan sumber daya pembangunan secara serasi,selaras, dan sinergis sehingga tercapai secara optimal.

(dalam buku Adon,2015;224).

Menurut Raharjo Adisasmita (2006;126), dalam mewujudkan tujuan pembangunan masyarakat terdapat paling sedikit empat jenis strategi :

1. Strategi pembangunan (*growth strategy*)
2. Strategi kesejahteraan (*welfare strategy*)
3. Strategi yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat (*responsive strategy*)
4. Strategi terpadu atau strategi yang menyeluruh (*integrated or holistic strategy*)

Adapun tujuan dalam pembangunan menurut Zamhariri (2008: 23), dapat dirumuskan, sebagai berikut :

1. Terciptanya kondisi umum yang mendorong pembangunan.
2. Termanfaatkannya potensi sumber daya sehingga memberikan manfaat bagi pembangunan oleh pemerintah setempat (yang bersangkutan), dunia usaha dan masyarakat umum.
3. Terlaksananya sejumlah investigasi dalam berbagai sektor.
4. Terlaksananya langkah-langkah dalam melaksanakan kemudi dan dorongan bagi kegiatan dan investasi swasta.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pembangunan desa berarti pembangunan yang mencakup seluruh kegiatan masyarakat harus melakukan pembangunan kearah yang lebih baik dari keanekaragaman suku, budaya, bahasa, kemudian dilihat dari aspek ekonomi masyarakat, kesejahteraan masyarakat, sosial-budaya masyarakat juga harus dibangun dengan baik itulah pengertian dari pembangunan desa yang bersifat keseluruhan yang ada dalam masyarakat desa harus adanya perubahan-perubahan yang merupakan arti dari pembangunan masyarakat desa.

Sedangkan pembangunan di desa berarti kegiatan pembangunan yang membangun infrastruktur bukan hanya itu bisa dikatakan pembangunan fisik desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang pencakupan lebih spesifik atau khusus yang skala prioritas.

5. Konsep Desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan.

Dalam tabel II.1 dijelaskan model pembangunan masyarakat yang terbagi menjadi tiga (pengembangan masyarakat lokal, perencanaan sosial, dan aksi sosial), yang masing-masing mempunyai perbedaan dari sisi asumsi dasar, tujuan hingga strategi-teknik perubahan. Pendekatan terakhir ini yang paralel dengan pemberdayaan masyarakat menuju keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan dengan kearah yang lebih baik karna Pemberdayaan juga menyatakan Partisipasi yang lebih besar dalam proses pembangunan. Pembangunan partisipasi dimaknaidalam konteks menempatkan posisi

berdiri masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah objek penerima manfaat yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subjek (agen atau partisipan yang bertindak) yang berbuat secara mandiri. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan. Maka dari itu masyarakat mempunyai pengembangan dalam bermasyarakat dalam perubahan yang baik sesuai arah pembangunan.

Tabel II.1 : Tipe Pengembangan Masyarakat Desa

PARAMETER	PENGEMBANGAN MASYARAKAT LOKAL	PERENCANAAN SOSIAL	AKSI SOSIAL
Orientasi tujuan	Kemandirian, integrasi dan kemampuan masyarakat (tujuan proses)	Pemecahan masalah sosial yang ada di masyarakat (tujuan tugas/hasil)	Perubahan struktur kekuasaan, lembaga dan sumber (tujuan proses dan tugas)
Asumsi mengenai struktur masyarakat dan kondisi masalah	Keseimbangan, kurang kemampuan dalam relasi dan pemecahan masalah	Masalah sosial nyata: kemiskinan, pengangguran, kenakalan remaja	Ketidakadilan, kesengsaraan, ketidakmerataan, ketidaksetaraan
Asumsi mengenai kepentingan masyarakat	Kepentingan umum atau perbedaan-perbedaan yang dapat diselaraskan	Kepentingan yang dapat diselaraskan atau konflik kepentingan	Konflik kepentingan yang tidak dapat diselaraskan: ketiadaan sumber
Orientasi terhadap struktur kekuasaan	Struktur kekuasaan sebagai kolaborasi, perwakilan	Struktur kekuasaan sebagai pekerja dan sponsor	Struktur kekuasaan sebagai sasaran aksi, dominasi elit harus dihilangkan
Peranan masyarakat	Partisipasi dalam proses pemecahan masalah	Konsumen atau penerima pelayanan	Pelaku, elemen, anggota
Media perubahan	Mobilisasi kelompok-kelompok kecil	Mobilisasi organisasi formal	Mobilisasi organisasi massa dan politik
Strategi perubahan	Pelibatan masyarakat dalam pemecahan masalah	Penentuan masalah dan keputusan melalui tindakan rasional para ahli	Katalisasi dan pengorganisasian masyarakat untuk mengubah struktur kekuasaan
Teknik perubahan	Consensus dan diskusi kelompok, partisipasi, brain storming, role playing, bimbingan dan penyuluhan.	Advokasi, andragogy, perumusan kebijakan, perencanaan program	Konflik, unjuk rasa, konfrontasi, mobilisasi massa, analisis kekuasaan, media, agitasi, negoisasi, pembelaan

Sumber: Edi Suharto (2005) dalam Eko (2005)⁷⁾

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut R. Bintarto Desa adalah perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, serta kultural yang terdapat di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain.

Menurut R.H. Unang Soenardjo Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya: memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan: memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Ditinjau dari segi hubungan dengan penempatan dalam susunan tertib pemerintahan, dapat dicermati batasan berikut:

“Desa atau dengan nama aslinya yang setingkat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu “badan hukum” dan adalah pula “ Badan Pemerintahan” yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkupinya” (Bratha, 1982:27)

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Konsep pelaksanaan

Menurut Nurdin Usman dalam buku berjudul Konteks Berbasis Implementasi Kurikulum nya menyatakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut :

Implementasi diarahkan untuk kegiatan, tindakan, tindakan, atau mekanisme sistem Implementasi tidak hanya aktivitas, tetapi kegiatan dan untuk mencapai tujuan dari kegiatan yang direncanakan (Usman,2002; 70).

Menurut Guntur Setiawan dalam bukunya yang berjudul Implementasi Dalam Pembangunan Birokrasi mengungkapkan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut :

Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapai dan memerlukan eksekutif jaringan, birokrasi yang efektif . (Setiawan,2004;39)

Menurut Hanifah Harsono dalam bukunya yang berjudul Implementasi Kebijakan dan Politik menyatakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut :

Implementasi adalah proses untuk melaksanakan kebijakan tersebut ke dalam tindakan kebijakan politik dalam pembangunan Kebijakan administrasi dalam rangka meningkatkan program. (Harsono,2002;67).

Kemudian Putra (200;80) mengatakan bahwa salah satu tolok ukur keberhasilan suatu kebijakan terletak pada proses implementasinya. Dari kedua pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan tidak akan sukses, jika dalam pelaksanaannya tidak ada kaitannyadengan tujuan yang telah ditetapkan.Dapat dikatakan bahwa hubunganantara perencanaan dan pelaksanaan sangat erat.

Model manajemen implementasi menurut Riant Nugroho (2004;163) menggambarkan pelaksanaan atau implementasi kebijakan di dalam konteks manajemen berada di dalam kerangka organizing-leading-controlling. Jadi ketika kebijakan sudah dibuat, maka tugas selanjutnya adalah mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan tersebut. Secara rinci kegiatan didalam menejemen implementasi kebijakan dapat disusun melalui :

- a. Implementasi strategi
- b. Pengorganisasian
- c. Penggerakkan dan kepemimpinan
- d. Pengendalian

Implementasi melibatkan usaha dari policy makers untuk memengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut “street level bureaucrats” untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran. Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor, misalnya, kebijakan pembangunan infrastruktur publik untuk membantu masyarakat agar memiliki kehidupan yang lebih baik, Sebaliknya untuk kebijakan makro, misalnya, kebijakan pengurangan kemiskinan di pedesaan, maka usaha-usaha implementasi akan melibatkan berbagai institusi, seperti birokrasi kabupaten, kecamatan, pemerintah desa.

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Dengan Adanya Implementasi Kebijakan mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk melaksanakan untuk memimpin pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan secara rinci kegiatan implementasi kebijakan di mulai dari implementasi strategi, pengorganisasian, pergerakan kepemimpinan dan pengendalian akan berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diinginkan.

Menurut Mustopadidjaja (2004;32), pelaksanaan merupakan tahapan dalam *policy cycle* (lingkaran kebijakan) dari keseluruhan proses kebijakanyang berlangsung dalam suatu *policy system* (sistem kebijakan) yang kompleks dan dinamik, serta akan menentukan berhasil atau gagalnya suatu kebijakan.

Menurut Syaukani dkk (2004;295) Implementasi adalah pelaksanaan serangkaian kegiatan dalam rangka untuk memberikan kebijakan publik sehingga kebijakan dapat membawa hasil, seperti yang diharapkan.

Mereka termasuk serangkaian kegiatan, persiapan Pertama maju menetapkan aturan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut.Kedua, mempersiapkan sumber daya untuk mendorong pelaksanaan kegiatan termasuk infrastruktur, sumber daya keuangan dan tentu saja penentuan siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan ini.Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan konkret untuk umum.

Berdasarkan pandangan ini diketahui bahwa proses pelaksanaan kekhawatiran kebijakan yang sebenarnya tidak hanya perilaku badan administratif bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan kepada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, sosial dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat untuk menetapkan arah yang tujuan kebijakan publik dapat terwujud sebagai hasil dari kegiatan pemerintah.

Sementara itu, menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier di Wahab (2005;65) menjelaskan arti dari pelaksanaan ini dengan mengatakan bahwa pemahaman yang sebenarnya apa yang terjadi setelah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan fokus kebijakan pelaksanaan, yaitu peristiwa dan bekerja dengan kegiatan yang timbul

setelah pedoman disahkannya kebijakan negara, yang meliputi upaya untuk mengelola serta atas konsekuensi / dampak nyata pada orang-orang atau peristiwa.

Syukur dalam Surmayadi (2005;79) mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi, yaitu: (1) adanya program atau kebijakan yang sedang dilaksanakan (2) kelompok sasaran, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan untuk manfaat dari program, perubahan atau perbaikan (3) menerapkan elemen (Pelaksana) baik untuk organisasi atau individu yang bertanggung jawab untuk memperoleh pelaksanaan dan pengawasan proses implementasi.

Pendapat Cleaves yang dikutip (dalam Wahab,2008;187), yang secara tegas menyebutkan bahwa: Implementasi itu mencakup “Proses bergerak menuju tujuan kebijakan dengan cara langkah administratif dan politik”. Keberhasilan atau kegagalan implementasi sebagai demikian dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau mengoperasionalkan program-program yang telah dirancang sebelumnya.

Menurut Friedrich (dalam Wahab,2008;3) Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Menurut Ndraha (dalam Huraerah,2011;110) pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat diperlukan dalam setiap tahap pembangunan yang dimulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pemanfaatan, serta tahap evaluasi.

7. Konsep partisipasi

Banyak definisi yang dikemukakan para ahli tentang partisipasi. Namun secara harfiah, partisipasi berarti “turut berperan serta dalam suatu kegiatan”, “keikutsertaan atau peran serta dalam suatu kegiatan”, “peran serta aktif atau proaktif dalam suatu kegiatan”. Partisipasi dapat didefinisikan secara luas sebagai “bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan dari dalam dirinya (*intrinsik*) maupun dari luar dirinya (*ekstrinsik*) dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan”.

Seperti yang dikemukakan oleh Kaho (2002;40) menjelaskan ada 4 hal penting dalam partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan, yaitu:

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan

setiap penyelenggaraan, terutama dalam kehidupan bersama masyarakat, partisipasi dalam pengambilan keputusan atau perencanaan ini merupakan peran aktif masyarakat dalam menentukan kebijakan apa yang akan diputuskan yang sesuai dengan keinginan masyarakat yang bersangkutan dan juga keterlibatan seseorang pada tahap penyusunan kepanitian dan anggaran pada suatu kegiatan/proyek secara terencana atas keputusan bersama melalui musyawarah antara pemerintah dan masyarakat.

2. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Partisipasi ini merupakan tindak lanjut dari tahap pertama diatas. Partisipasi dalam pembangunan ini dilakukan melalui keikutsertaan masyarakat dalam memberikan kontribusi guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berwujud tenaga, uang, barang material, ataupun informasi yang berguna bagi pelaksanaan pembangunan

3. Partisipasi dalam memanfaatkan hasilPartisipasi masyarakat dalam menggunakan dan memanfaatkan hasil pembangunan dapat diartikan sebagai peran masyarakat dalam merawat, memelihara dan menjaga hasil

pembangunan tersebut yang telah dilaksanakan dapat digunakan setiap saat dan berlangsung lama.

4. Partisipasi dalam mengevaluasi, Sudah umum disepakati bahwa setiap penyelenggaraan apa pun dalam kehidupan bersama, hanya dapat dinilai berhasil apabila memberikan manfaat bagi masyarakat diberi kesempatan menilai hasil yang telah dicapai. Tujuan evaluasi yaitu juga dapat dijadikan sebagai suatu bahan pertimbangan dalam merencanakan program pembangunan kedepannya.

Menurut Keith Davis, partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya. Dalam definisi tersebut kunci pemikirannya adalah keterlibatan mental dan emosi. Sebenarnya partisipasi adalah suatu gejala demokrasi dimana orang diikutsertakan dalam suatu perencanaan serta dalam pelaksanaan dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajibannya. Partisipasi itu menjadi baik dalam bidang-bidang fisik maupun bidang mental serta penentuan kebijaksanaan.

Partisipasi masyarakat merupakan masukan bagi proses pembangunan untuk memperlancar pelaksanaan pembangunan, diperlukan partisipasi dalam rangka memperoleh gambaran mengenai potensi, sikap dan kebutuhan masyarakat.

Menurut Conyers (dalam Jiana,2004;31), partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi, mengenai kondisi, kebutuhan dan sifat masyarakat.

Menurut Sumaryadi (201;46) partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan desa baik dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian modal atau materi, serta ikut memanfaatkan hasil-hasil pembangunan.

Menurut Soetomo (2010;13) partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan yang dilandasi oleh kesadaran dan determinasi.

Dari hal diatas disimpulkan bahwa tanpa partisipasi akan sulit untuk mengetahui pembangunan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat, karena masyarakatlah yang paling mengetahui keadaan, potensi dan kebutuhan yang mereka perlukan.

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007;27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Menurut Juliantara (2004;84) partisipasi diartikan sebagai keterlibatan setiap warga negara yang mempunyai hak dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya, partisipasi masyarakat merupakan kebebasan dan berbicara dan berpartisipasi secara konstruktif.

Menurut Abe (2000;117-118) partisipasi masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan pembangunan akan memiliki 3 dampak penting, yaitu

- 1) masyarakat akan terhindar dari peluang manipulasi. Keterlibatan masyarakat secara langsung akan memperjelas apa yang sebetulnya dikehendaki masyarakat,
- 2) memberikan nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan, semakin banyak mereka yang terlibat maka akan semakin baik, dan
- 3) meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik masyarakat.

Dari penjelasan di atas maka keterlibatan masyarakat dalam porses kegiatan musyawarah rencanapembangunan desa diharapkan agar usulan-usulan pembangunan yang nantinya dihasilkan dari musyawarah tersebut benar-benar merupakan kebutuhan mayoritas masyarakat sehingga hasil dari realisasi pembangunan yang telah dirumuskan bersama memberikan manfaat kepada masyarakat banyak.

Menurut Sastropetro (dalam Isbandi, 2007:16) mengemukakan pengertian partisipasi adalah keterlibatan yang bersifat spontan yang disertai kesadaran dan tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Keterlibatan masyarakat yang diberikan untuk menunjang keberhasilan suatu kegiatan program pembangunan untuk mencapai tujuan bersama yaitu dengan memberikan bantuan dalam bentuk tenaga, partisipasi ini dapat berupa sumbangsih tenaga yang di berikan oleh sebagian atau seluruh masyarakat sehingga suatu kegiatan atau program pembangunan dapat terealisasi dengan maksimal dan menunjang suatu keberhasilan untuk mencapai tujuan bersama.

Sesuai dengan apa yang dikatakan menurut pendapat Cohen dan Uphoff dikutip oleh Soetomo (2008;12) Partisipasi dalam pemanfaatan hasil, yang diwujudkan keterlibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan.

Partisipasi masyarakat pada tingkatan ini diwujudkan dengan cara memberikan bantuan berupa tenaga dan uang untuk mengoperasikan dan memelihara proyek yang telah dibangun. Berbagai hasil pembangunan yang sudah tercapai dapat dilihat berhasil apa tidaknya apabila dalam penilaian orang banyak dianggap baik dan dapat memberikan manfaat yang sesuai dengan kebutuhan kesejahteraan masyarakat banyak.

Hal ini sesuai dengan pendapat Isbandi (2007;27) bahwa partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Menurut Holil (dalam Isbandi,2007;21) mengemukakan adanya beberapa bentuk partisipasi, antara lain : (a) Partisipasi dalam bentuk tenaga adalah partisipasi masyarakat yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program. (b) Partisipasi dalam bentuk uang adalah bentuk partisipasi masyarakat yang diberikan untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian suatu program pembangunan. Partisipasi ini dapat berupa sumbangan berupa uang tetapi tidak dipaksakan yang diberikan oleh sebagian atau seluruh masyarakat untuk suatu kegiatan atau program pembangunan. (c) Partisipasi dalam bentuk harta benda adalah partisipasi masyarakat yang diberikan dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas.

Selain itu ada juga faktor yang menghambat partisipasi masyarakat menurut Watson (dalam Soetomo,2008;214) mengatakan bahwa ada beberapa kendala (hambatan) yang dapat menghalangi terjadinya suatu perubahan antara lain kendala yang berasal dari kepribadian individu salah satunya adalah ketergantungan. Ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan merupakan hambatan dalam mewujudkan partisipasi atau keterlibatan masyarakat secara aktif, karena rasa ketergantungan ini masyarakat tidak memiliki inisiatif untuk melaksanakan pembangunan atau prakarsa mereka sendiri.

Menurut Davis (dalam Tangkilisan,2005;32), partisipasi masyarakat merupakan peristiwa psikologis yang mencakup keterlibatan mental dan emosional. Dalam hal ini masyarakat diharapkan dapat mengamati, memilih, menafsirkan, memahami berbagai jenis informasi yang diterimanya untuk kemudian dilaksanakan dalam bentuk tindakan.

Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka. Perkembangan kehidupan manusia yang makin meningkat membawa akibat berkembangnya pembangunan yang merupakan sarana manusia untuk mencapai tujuan hidupnya. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa pembangunan bersifat berhubungan satu sama lain sebagai satu kesatuan. Untuk itu perlu diusahakan oleh pemerintah bagaimana mengupayakan dan mengembangkan suatu pola pembangunan daerah yang makin meluas dan melibatkan semua kekuatan yang ada dalam masyarakat, karena potensi-potensi yang ada dalam masyarakat tersebut akan merupakan salah satu kekuatan yang dapat menunjang keberhasilan pembangunan di era otonomi.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sangat diperlukan, karena berhasil tidaknya pembangunan antara lain ditentukan oleh partisipasi aktif masyarakat dari seluruh masyarakat. Untuk itu partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, baik dalam bentuk sumbangan berupa uang atau harta benda, tenaga, termasuk ikut melaksanakan apa yang telah diputuskan bersama mutlak diperlukan.

Jadi dari beberapa pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi serta fisik peserta dalam memberikan respon terhadap kegiatan yang dilaksanakan dalam proses belajar mengajar

serta mendukung pencapaian tujuan dan bertanggung jawab atas keterlibatannya. Bentuk partisipasi yang nyata yaitu :

- a. Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan
 - b. Partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas
 - c. Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program
 - d. Partisipasi keterampilan, yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya
- Tjokromidjodjo (dalam jiana,2004:30) mengemukakan tiga bentuk partisipasi

masyarakat:

1. Partisipasi dalam perencanaan
2. Partisipasi dalam melaksanakan pembangunan
3. Partisipasi dalam pemanfaatan

Menurut sufian (2003:289), partisipasi masyarakat perdesaan dalam pembangunan, dapat dilihat dari:

1. Sumbangan pemikiran masyarakat dalam pengambilan keputusan
2. Sumbangan tenaga masyarakat dalam kegiatan gotong-royong
3. Sumbangan dana dalam swadaya masyarakat dan
4. Pemeliharaan hasil-hasil pembangunan oleh masyarakat

Partisipasi penting bagi pembangunan dan bahkan salah satu tujuan pembangunan itu sendiri. Yakni, tergeraknya seluruh masyarakat dalam suatu proses pembangunan beerencana sesuai dengan arah dan strategi yang telah diteetapkan melalui suatu bentuk proses pembangunan itu sendiri diharapkan akan menimbulkan perluasan partisipasi.

Konsep partisipasi mencakup kerjasama antara semua unsur terkait dan merupakan suatu kesepakatan, harapan, persepsi dan sistem komunikasi dimana kemampuan dan pendidikan mempengaruhi sikap dan cara berperilaku seseorang. Partisipasi berarti “mengambil bagian”, atau menurut Hoofsteede dalam Khairuddin (2000: 124) “*the taking*

part in one of more phases of the process” (partisipasi berarti ambil bagian dalam suatu tahap atau lebih dari suatu proses). Proses yang dimaksud dalam tulisan ini tentu saja proses pembangunan.

Hamijoyo,2007;21 & Pasaribu dan Simanjutak,2005;11Partisipasi buah pikiran lebih merupakan partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya.

Hamijoyo,2007;21 & Pasaribu dan Simanjutak,2005;11Partisipasi sosial, Partisipasi jenis ini diberikan oleh partisipan sebagai tanda paguyuban. Misalnya arisan, menghadiri kematian, dan lainnya dan dapat juga sumbangan perhatian atau tanda kedekatan dalam rangka memotivasi orang lain untuk berpartisipasi.

Chapin, 2002;43& Holil,1980;81Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan.Masyarakat terlibat dalam setiap diskusi/forum dalam rangka untuk mengambil keputusan yang terkait dengan kepentingan bersama.

Keterlibatan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan tidak terlepas dari peran pemerintah sebagai penyelenggaraan pembangunan. Jika dihubungkan dengan bab IV bagian umum angka 2 huruf f GBHN 1987 maka kemampuan pemerintah desa untuk melaksanakan tugasnya langsung bertalian dengan usaha menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangun dan penyelenggaraan administrasi desa yang semakin meluas dan efektif (dalam sufian,2003;294)

B. Kerangka Pikir

Berdasarkan dari variabel penelitian sehubungan dengan “ pelaksanaan partisipasi pembangunan “ kemudian mengangkat beberapa teori yang dijadikan indikator dari fenomena yang terjadi, maka penulis menjelaskan unsur diatas agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran maka indikator dalam penelitian ini meliputi :

Seperti yang dikemukakan oleh kaho (2002:40) menjelaskan ada 4 hal penting dalam partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan, yaitu:

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Partisipasi dalam memanfaatkan hasil.
4. Partisipasi dalam mengevaluasi.

Jadi dari uraian diatas, maka dapat dibuat kerangka berfikir yang berasal dari adopsi teori tentang persepsi masyarakat, tentang pelaksanaan partisipasi dalam pembangunan desa sebagai berikut :

Gambar II.1 : Kerangka Pikir Tentang Pelaksanaan Partisipasi



Sumber modifikasi penulis 2018

Berdasarkan gambar diatas, dapat dipahami bahwa proses partisipasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan masyarakat dalam pembangunan yang berbentuk fisik, karna pembangunan bukan dari material, ataupun non fisik. maka untuk meningkatkan rasa kesadaran masyarakat dalam membangun desa dengan rasa bersatu, bersama, bergotong – royong untuk kesejahteraan bersama, maka desa yang makmur akan diikuti oleh masyarakat yang mempunyai rasa solidaritas, rasa keluarga karna desa masih bersifat heterogen.

C. Hipotesis

Maka berdasarkan rumusan masalah yang penulis kemukakan sebelumnya, studi kepustakaan, dan kerangka pikir, hipotesis penelitian ini dirumuskan dalam bentuk kesimpulan sementara sebagai berikut bahwa diduga pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa surya indah kecamatan pelalawan kabupaten pelalawan belum berjalan dengan baik dan tidak sesuai dengan peraturan pendoman pembangunan desa dan rencana pembangunan jangka menengah desa surya indah kecamatan pelalawan kabupaten pelalawan.

D. Konsep Operasional

Untuk menghindari menghilangkan dari kesalahan pemahaman tentang beberapa konsep ataupun istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa konsep Operasional untuk lebih jelasnya penelitian ini peneliti memberi batasan berupa konsep operasional.

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau mendeskripsikan (mengambarkan) kegiatan atau memberikan suatu operasional(pekerjaan yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut).

1. Administrasi didefinisikan sebagai kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Organisasi merupakan setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat, seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang /sekelompok orang yang disebut bawahan.
3. Manajemen pada hakekatnya berfungsi untuk melakukan semua kegiatan – kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dalam batas–batas kebijaksanaan umum yang telah ditentukan pada tingkat administrasi
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.
8. Pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)”.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
11. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Seperti yang dikemukakan oleh kaho (2002:40) menjelaskan ada 4 hal penting dalam partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan, yaitu:
 - a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan
Setiap penyelenggaraan, terutama dalam kehidupan bersama masyarakat, partisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan ini merupakan peran

aktif masyarakat dalam menentukan kebijakan apa yang akan diputuskan yang sesuai dengan keinginan masyarakat yang bersangkutan dan juga keterlibatan seseorang pada tahap penyusunan kepanitian dan anggaran pada suatu kegiatan/proyek secara terencana atas keputusan bersama melalui musyawarah antara pemerintah dan masyarakat. Semakin besar kemampuan untuk menentukan nasib sendiri, semakin besar partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Apa bila mereka merasa ikut andil dalam menentukan apa yang akan dilaksanakan.

b. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan

Partisipasi ini merupakan tindak lanjut dari tahap pertama diatas. Partisipasi dalam pembangunan ini dilakukan melalui keikutsertaan masyarakat dalam memberikan kontribusi guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berwujud tenaga, uang, barang material, ataupun informasi yang berguna bagi pelaksanaan pembangunan

c. Partisipasi dalam memanfaatkan hasil

Partisipasi masyarakat dalam menggunakan dan memanfaatkan hasil pembangunan dapat diartikan sebagai peran masyarakat dalam merawat, memelihara dan menjaga hasil pembangunan tersebut yang telah dilaksanakan dapat digunakan setiap saat dan berlangsung lama.

d. Partisipasi dalam mengevaluasi

Sudah umum disepakati bahwa setiap penyelenggaraan apa pun dalam kehidupan bersama, hanya dapat dinilai berhasil apabila memberikan manfaat bagi masyarakat diberi kesempatan menilai hasil yang telah dicapai. Tujuan evaluasi itu juga dapat dijadikan sebagai suatu bahan pertimbangan dalam merencanakan program pembangunan kedepannya.

E. Operasionalisasi Variabel

Tabel II.2: Operasionalisasi variabel tentang Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik di Desa Surya Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

Konsep	Variabel Dimensi	Indikator	Item Penilaian	Ukuran
1	2	3	4	5
Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007: 27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang adadi masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.	Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Surya Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan	<p>1. Pelaksanaan Partisipasi dalam pengambilan keputusan perencanaan</p> <p>2. Pelaksanaan Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan</p>	<p>a. Frekwensi menghadiri rapat desa yang khususnya membicarakan masalah rencana pembangunan masyarakat desa.</p> <p>b. Tindakan yang dilakukan masyarakat dalam rapat-rapat desa.</p> <p>a. Keikutsertaan secara langsung dalam pelaksanaan pembangunan misalnya keikutsertaan dalam pembuatan jalan desa, pembuatan pos ronda dan lain-lain.</p> <p>b. Keikutsertaan secara tidak langsung tetapi membantu secara sepenuhnya dalam pelaksanaan pembangunan yakni dalam bentuk sumbangan material seperti pasir, batu dan sebagainya serta sumbangan dana (biaya)</p>	<p>Tinggi</p> <p>Sedang</p> <p>Rendah</p> <p>Tinggi</p> <p>Sedang</p> <p>Rendah</p>

1	2	3	4	5
		3. Pelaksanaan Partisipasi dalam memanfaatkan hasil	<p>a. Ikut sertadalam memanfaatkan fasilitas, umum seperti, fasilitas sekolah, fasilitas klinik dan sebagainya.</p> <p>b. Ikut serta dalam menikmati manfaat secara pribadi seperti merasa puas terhadap hasil pembangunan yang telah tercapai, merasa aman di dalam hidup bermasyarakat, serta memperoleh kehidupan masa depan yang lebih baik.</p>	<p>Tinggi</p> <p>Sedang</p> <p>Rendah</p>
		4. Pelaksanaan Partisipasi dalam mengevaluasi	<p>a. Tanggapan masyarakat terhadap tindakan hasil-hasil pelaksanaan pembangunan dan rumusan keputusan desa.</p> <p>b. Tanggapan masyarakat terhadap tindakan pembangunan dengan rencana yang telah ditentukan baik dari segi waktu, biaya, dan tempat.</p> <p>c. Keterlibatan dalam menanggapi sesuai tidaknya dengan kebutuhan masyarakat desa.</p>	<p>Tinggi</p> <p>Sedang</p> <p>Rendah</p>

Sumber modifikasi penulis 2018

F. Teknik pengukuran

Teknik pengukuran data dalam penelitian ini untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. dengan jawaban setiap item instrument 3 kategori, yaitu Tinggi, Sedang, Rendah, pengukuran data difokuskan pada perwujudan pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Untuk mengarahkan data uraian dari masing-masing pengukuran tersebut sebagai berikut :

Tinggi : Apabila seluruh indikator berada pada kategori baik 67% -100%

Sedang : Apabila seluruh indikator berada pada kategori cukup baik 34% -66%

Rendah : Apabila seluruh indikator dikatakan berada pada kategori kurang baik dengan total skor berada pada 0%-33%

Selanjutnya untuk mengatur setiap indikator yang ada, maka dapat dilakukan pengukuran sebagai berikut :

1. Pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan, seperti frekwensi menghadiri rapat desa khususnya membicarakan masalah rencana pembangunan masyarakat desa, dan tindakan yang dilakukan masyarakat dalam rapat-rapat desa keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Kriteria penilaian sebagai berikut ini :

Tinggi : Apabila masyarakat desa berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan fisik desa, sehingga dinilai dapat terlaksana berada pada presentase antara 67%-100%.

Sedang : Apabila masyarakat desa berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan fisik desa, sehingga dinilai dapat terlaksana berada pada presentase antara 34%-66%

Rendah :Apabila masyarakat desa berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan fisik desa, sehingga dinilai dapat terlaksana berada pada presentase 0%-33.

2. Pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan misalnya keikutsertaan dalam pembuatan jalan desa, pembuatan pos ronda dan lain-lain, dan keikutsertaan secara tidak langsung tetapi membantu secara sepenuhnya dalam pelaksanaan pembangunan yakni dalam bentuk sumbangan material seperti pasir, batu, dan sebagainya serta sumbangan dana (biaya). Kriteria penilaian sebagai berikut ini :

Tinggi: Apabila masyarakat desa berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik desa, sehingga dinilai dapat terlaksana berada pada presentase antara 67%-100%.

Sedang : Apabila Masyarakat desa berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik desa, sehingga dinilai dapat kurang terlaksana berada pada presentase antara 34%-66%

Rendah : Apabila masyarakat ikutserta dalam pelaksanaan pembangunan fisik desa, sehingga dinilai tidak dapat terlaksana berada pada presentase antara 0-33%.

3. Pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan hasil pembangunan fisik desa, ikut serta dalam memanfaatkan fasilitas umum seperti sekolah, klinik, dan sebagainya. Dan ikut serta dalam menikmati secara pribadi masyarakat secara puas terhadap hasil pembangunan yang telah tercapai dan merasa aman. Kriteria penilaian sebagai berikut:

Tinggi :Apabila masyarakat ikut serta dalam pemanfaatan hasil pembangunan fisik desa, sehingga dinilai dapat terlaksana berada pada presentase antara 67%-100%.

Sedang:Apabila masyarakat ikut serta dalam pemanfaatan hasil pembangunan fisik desa, sehingga dinilai kurang terlaksana dapat terlaksana berada pada presentase antara 34%-66%.

Rendah:Apabila masyarakat ikut serta dalam pemanfaatan hasil pembangunan fisik desa, sehingga dinilai tidak dapat terlaksana berada pada presentase antara 0-33%

4. Pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam mengevaluasi tanggapan masyarakat terhadap tindakan hasil pelaksanaan pembangunan dan rumusan keputusan desa, tanggapan masyarakat dalam rencana yang telah ditentukan baik dari segi waktu,biaya,dan tempat.Kriteria penilaian sebagai berikut :

Tinggi : Apabila masyarakat ikut serta dalam mengevaluasi hasil pembangunan fisik desa, sehingga dinilai dapat terlaksana berada pada presentase antara 67%-100%.

Sedang : Apabila masyarakat ikut serta dalam mengevaluasi hasil pembangunan fisik desa, sehingga dinilai kurang terlaksana berada pada presentase antara 34%-66%.

Rendah :Apabila masyarakat ikut serta dalam mengevaluasi hasil pembangunan fisik desa, sehingga dinilai tidak dapat terlaksana berada pada presentase antara 0-33%.

G. Pengukuran Variabel

Untuk membuat kesimpulan dari data-data yang diperoleh melalui indikator diatas, maka dibuat pengukuran variabel sebagai berikut:

Tinggi :Apabila jumlah rata-rata presentase dari ketiga indikator berada pada kategori baik dan tinggi antara 67%-100%.

Sedang :Apabila jumlah rata-rata presentase dari ketiga indikator berada pada kategori cukup baik atau sedang antara 34%-66%.

Rendah :Apabila jumlah rata-rata presentase dari setiap ketiga indikator berada pada kategori kurang baik atau rendah antara 0-33%.

